

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, melainkan juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dalam prosesnya, pembangunan ekonomi sering kali menimbulkan perbedaan tingkat kemajuan antarwilayah karena adanya variasi sumber daya, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, maupun aktivitas ekonomi. Perbedaan tersebut kemudian memunculkan kesenjangan atau disparitas ekonomi antar daerah yang menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan nasional (Sjafrizal, 2018).

Di Indonesia, persoalan disparitas ekonomi masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang terus mendapat perhatian. Hal ini terlihat dari masih adanya perbedaan tingkat kesejahteraan, produktivitas ekonomi, serta perkembangan pembangunan antarwilayah. Salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa dipilih dalam penelitian ini karena merupakan pusat aktivitas ekonomi nasional dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibanding wilayah lainnya. Sebagian besar kegiatan industri, perdagangan, investasi, hingga pusat pemerintahan terkonsentrasi di wilayah ini sehingga menjadikan Pulau Jawa sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional

(Badan Pusat Statistik, 2024). Namun demikian, tingginya aktivitas ekonomi tersebut ternyata belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pembangunan antarprovinsi.

Setiap provinsi di Pulau Jawa memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda-beda. DKI Jakarta, misalnya, berkembang sebagai pusat pemerintahan, jasa, dan perdagangan, sementara Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan aktivitas industri manufaktur yang cukup dominan. Di sisi lain, Daerah Istimewa Yogyakarta lebih berkembang melalui sektor pendidikan, pariwisata, dan jasa. Perbedaan karakteristik ekonomi tersebut membuat perkembangan antarprovinsi di Pulau Jawa tidak selalu berjalan pada tingkat yang sama, sehingga manfaat pembangunan yang diterima masyarakat juga cenderung berbeda (Kuncoro, 2014).

Untuk melihat kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan Indeks Williamson sebagai alat ukur disparitas ekonomi antarwilayah. Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan ekonomi berdasarkan perbedaan pendapatan per kapita dengan mempertimbangkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah (Sjafrizal, 2018).



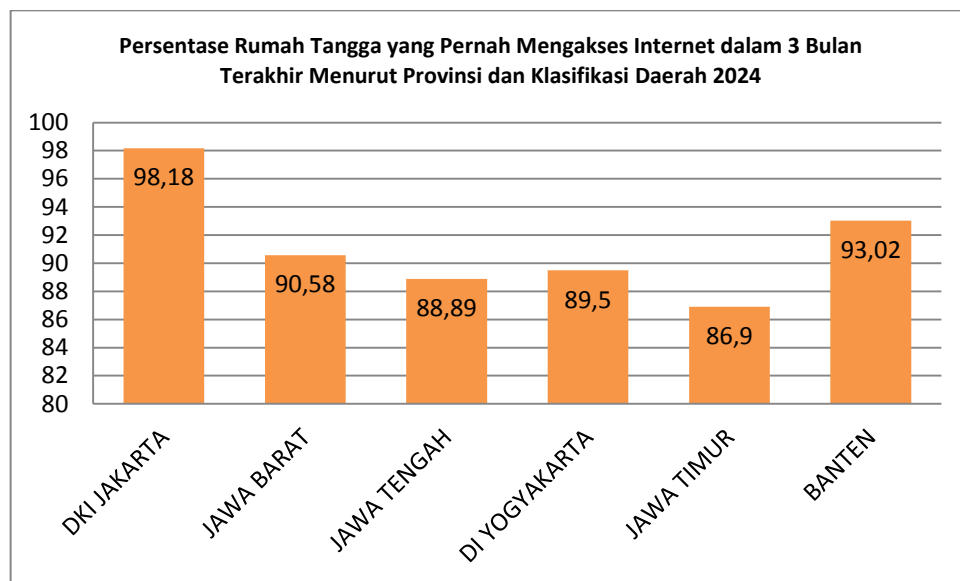
Sumber : Badan Pusat Statistik (2025); data diolah
Gambar 1.1 Indeks Williamson

Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Williamson selama periode 2020–2024, tingkat disparitas ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa masih menunjukkan adanya perbedaan meskipun secara umum berada pada kategori relatif rendah. Pada tahun 2024, Jawa Timur memiliki nilai Indeks Williamson sebesar 0,267283, diikuti Jawa Barat sebesar 0,211708, DKI Jakarta sebesar 0,179178, Banten sebesar 0,164113, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,139660, dan Jawa Tengah sebesar 0,045621 (BPS, 2024; data diolah). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi di Pulau Jawa belum sepenuhnya merata antarprovinsi, meskipun wilayah ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Disparitas ekonomi antarwilayah pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di era digital seperti saat ini, TIK telah menjadi bagian penting dalam

berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan, komunikasi, pekerjaan, hingga kegiatan ekonomi. Kehadiran teknologi memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih luas, mempercepat aktivitas ekonomi, memperbesar peluang usaha, serta mendorong berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi berbasis digital. Dalam perspektif Teori Pertumbuhan Endogen yang dikembangkan oleh Romer, perkembangan teknologi dipandang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi sehingga berpotensi memperluas kesempatan ekonomi masyarakat (Todaro & Smith, 2020). Oleh karena itu, perkembangan TIK sering dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Temuan penelitian Setyadi et al. (2023) juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki keterkaitan terhadap perubahan tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Dalam penelitian ini, perkembangan teknologi diukur melalui penetrasi internet. Menurut Statistik Telekomunikasi Indonesia (2024), penetrasi internet merupakan proporsi individu atau pengguna internet dalam suatu wilayah yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Secara operasional, penelitian ini menggunakan indikator persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir untuk menggambarkan tingkat penetrasi internet pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)
Gambar 1.2 Penetrasi Internet 2024

Berdasarkan Gambar 1.2, tingkat penetrasi internet antarprovinsi di Pulau Jawa masih menunjukkan perbedaan. Pada tahun 2024, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat penetrasi internet tertinggi sebesar 98,18 persen, diikuti Banten sebesar 93,02 persen dan Jawa Barat sebesar 90,58 persen. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 89,50 persen, Jawa Tengah sebesar 88,89 persen, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan tingkat penetrasi internet terendah yaitu sebesar 86,90 persen (BPS, 2025).

Perbedaan tingkat penetrasi internet tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap teknologi digital di Pulau Jawa masih belum sepenuhnya merata. Padahal, internet memiliki peran penting dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi, seperti pemasaran digital, perdagangan elektronik, akses informasi pasar, layanan keuangan digital, hingga pengembangan usaha berbasis teknologi. Semakin tinggi tingkat penetrasi internet pada suatu wilayah, semakin

besar pula peluang masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kesempatan ekonomi yang tersedia melalui teknologi digital.

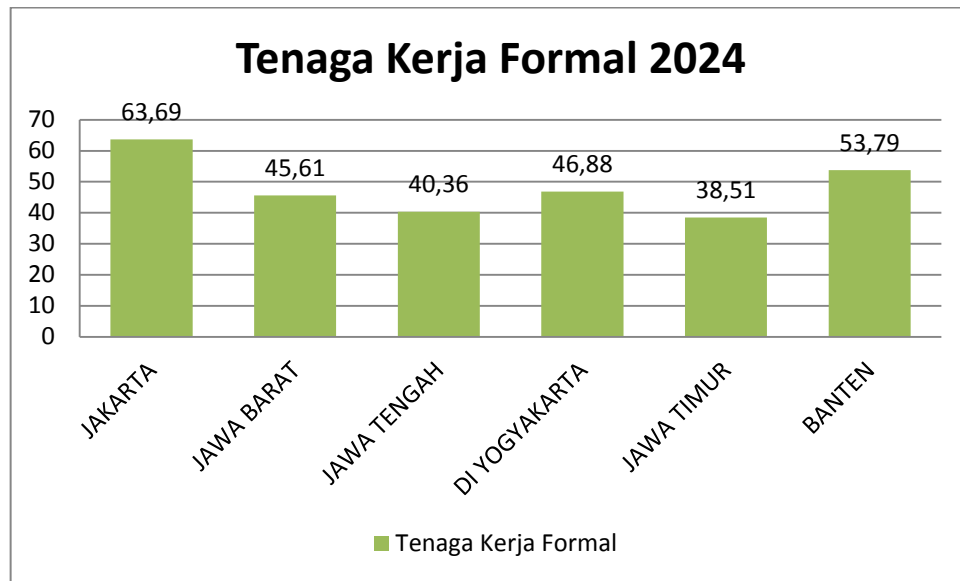
Penetrasi internet yang lebih tinggi diduga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Sebaliknya, wilayah dengan tingkat penetrasi internet yang relatif rendah berpotensi mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga perkembangan ekonominya dapat berjalan lebih lambat. Temuan Setyadi dan Indriyani (2023) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian Luthfi dan Pudjihardjo (2025) menemukan bahwa penggunaan internet memiliki pengaruh terhadap pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.

Selain penetrasi internet, kondisi tenaga kerja formal juga diduga memengaruhi disparitas ekonomi antarwilayah. Dalam proses pembangunan ekonomi, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Menurut Teori Pertumbuhan Endogen, kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Todaro & Smith, 2020).

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kualitas struktur pasar kerja adalah persentase tenaga kerja formal. Tenaga kerja formal umumnya memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih stabil,

perlindungan kerja yang lebih baik, serta akses yang lebih besar terhadap pelatihan dan pemanfaatan teknologi dibandingkan tenaga kerja informal (Todaro & Smith, 2020). Oleh karena itu, wilayah dengan proporsi tenaga kerja formal yang lebih tinggi cenderung memiliki aktivitas ekonomi yang lebih produktif, daya saing yang lebih baik, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi (OECD, 2024). Sebaliknya, wilayah yang masih didominasi oleh sektor informal umumnya menghadapi produktivitas yang lebih rendah, keterbatasan perlindungan kerja, dan pendapatan yang kurang stabil, sehingga berpotensi memperlebar disparitas pembangunan ekonomi antarwilayah (ILO, 2023).

Selain mencerminkan kualitas pekerjaan, proporsi tenaga kerja formal juga menggambarkan tingkat modernisasi struktur perekonomian suatu wilayah. Wilayah yang mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan formal umumnya memiliki tingkat produktivitas, investasi, dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang masih didominasi sektor informal. Oleh karena itu, perbedaan proporsi tenaga kerja formal antarprovinsi diduga turut memengaruhi perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antarwilayah (Todaro & Smith, 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)
Gambar 1.3 Tenaga kerja Fromal 2024

Kondisi tenaga kerja formal antarprovinsi di Pulau Jawa pada tahun 2024 masih menunjukkan adanya perbedaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat tenaga kerja formal tertinggi sebesar 63,69 persen, diikuti Banten sebesar 53,79 persen. Sementara itu, Jawa Timur memiliki tingkat tenaga kerja formal terendah sebesar 38,51 persen, disusul Jawa Tengah sebesar 40,36 persen. Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta masing-masing memiliki persentase tenaga kerja formal sebesar 45,61 persen dan 46,88 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan antarprovinsi di Pulau Jawa masih cukup beragam. Di satu sisi, terdapat wilayah dengan dominasi pekerjaan formal yang relatif tinggi, namun di sisi lain masih terdapat provinsi dengan proporsi tenaga kerja informal yang cukup besar. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena perbedaan struktur ketenagakerjaan

diduga dapat memengaruhi kemampuan masing-masing wilayah dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih merata.

Jika diperhatikan, kondisi tersebut menunjukkan fenomena yang menarik. Di satu sisi, tingkat penetrasi internet di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya transformasi digital. Proporsi tenaga kerja formal juga relatif lebih tinggi dibandingkan sebagian besar wilayah lain di Indonesia, meskipun masih terdapat perbedaan antarprovinsi. Di sisi lain, hasil penghitungan Indeks Williamson menunjukkan bahwa disparitas ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa masih tetap terjadi selama periode penelitian. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi digital dan peningkatan kesempatan kerja formal belum tentu secara langsung menghasilkan pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Oleh karena itu, hubungan antara penetrasi internet, tenaga kerja formal, dan disparitas ekonomi masih perlu dikaji lebih lanjut.

Persoalan ini penting untuk diperhatikan karena apabila disparitas ekonomi terus berlangsung, maka perbedaan tingkat kesejahteraan antarwilayah dapat semakin melebar. Ketimpangan pembangunan tidak hanya berdampak pada perbedaan pendapatan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi kesempatan kerja, akses pendidikan, kualitas hidup, hingga produktivitas ekonomi daerah (Todaro & Smith, 2020). Di era transformasi digital, internet telah menjadi salah satu faktor penting yang mampu memperluas akses informasi, pasar, dan berbagai layanan ekonomi. Namun, apabila pemanfaatannya tidak diikuti dengan pemerataan kesempatan kerja yang berkualitas, perkembangan digital justru

berpotensi memperbesar kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara penetrasi internet, tenaga kerja formal, dan disparitas ekonomi menjadi penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai perkembangan teknologi digital dan ketimpangan ekonomi telah banyak dilakukan. Patria dan Erumban (2020) menemukan bahwa adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki keterkaitan dengan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, Wilantari et al. (2022) menunjukkan bahwa teknologi informasi dan tenaga kerja merupakan faktor yang memengaruhi disparitas ekonomi regional di Indonesia. Namun, penelitian tersebut masih menggunakan indikator tenaga kerja secara umum dan belum secara khusus mengkaji tenaga kerja formal maupun menggunakan penetrasi internet sebagai indikator perkembangan digital. Kartiasih et al. (2023) menunjukkan bahwa perkembangan digital di Indonesia masih memiliki ketimpangan antarwilayah, sehingga peningkatan akses teknologi belum tentu menghasilkan manfaat ekonomi yang sama pada setiap wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan perbedaan kemampuan wilayah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi ketika menganalisis hubungan antara penetrasi internet dan disparitas ekonomi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh perkembangan teknologi terhadap disparitas ekonomi masih menghasilkan temuan yang beragam sehingga faktor lain, seperti kondisi ketenagakerjaan, diduga turut memengaruhi disparitas ekonomi antarwilayah.

Penelitian yang lebih spesifik dilakukan oleh Jahidah dan Adzimatunur (2025) yang menganalisis pengaruh penggunaan TIK, keahlian TIK, dan infrastruktur TIK terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan TIK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan keahlian TIK dan infrastruktur TIK tidak berpengaruh signifikan. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih menggunakan Gini Ratio sebagai indikator ketimpangan pendapatan dan dilakukan pada tingkat nasional. Selain itu, penelitian tersebut belum memasukkan kondisi ketenagakerjaan sebagai faktor yang diduga turut memengaruhi pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah.

Rizqullah (2021) menjelaskan bahwa sektor informal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pekerja memperoleh pendapatan yang relatif rendah karena pekerjaan informal umumnya memiliki tingkat upah dan perlindungan kerja yang lebih rendah dibandingkan pekerjaan formal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan proporsi tenaga kerja formal antarwilayah diduga turut memengaruhi disparitas ekonomi karena mencerminkan perbedaan produktivitas dan kapasitas ekonomi masing-masing wilayah.

Selain itu, penelitian Ramadani dkk. (2026) menunjukkan bahwa proporsi tenaga kerja formal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa

peningkatan tenaga kerja formal berpotensi mendorong pemerataan distribusi pendapatan. Akan tetapi, penelitian tersebut menggunakan Indeks Theil sebagai ukuran ketimpangan pendapatan dengan pendekatan ekonometrika spasial pada tingkat nasional serta belum mengkaji hubungan antara perkembangan digital dan tenaga kerja formal terhadap disparitas ekonomi antarwilayah.

Di sisi lain, penelitian mengenai disparitas ekonomi di Indonesia sebagian besar masih menggunakan Gini Ratio atau Indeks Theil sebagai indikator ketimpangan, sedangkan penelitian yang menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur disparitas ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai perkembangan digital umumnya hanya mengkaji pengaruh teknologi terhadap ketimpangan tanpa mempertimbangkan tenaga kerja formal sebagai faktor yang turut memengaruhi pemerataan pembangunan. Penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh penetrasi internet dan tenaga kerja formal terhadap disparitas ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa juga masih sangat terbatas. Padahal, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi nasional dengan tingkat perkembangan digital dan industrialisasi yang relatif lebih maju dibandingkan wilayah lain di Indonesia, namun masih menunjukkan adanya disparitas ekonomi antarprovinsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara perkembangan digital, tenaga kerja formal, dan disparitas ekonomi masih perlu dikaji lebih lanjut.

Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh tenaga kerja formal terhadap ketimpangan ekonomi juga masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital tidak selalu

memberikan dampak yang sama terhadap pemerataan pembangunan karena manfaatnya dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing wilayah dalam memanfaatkan teknologi tersebut (Kartiasih et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh penetrasi internet dan tenaga kerja formal terhadap disparitas ekonomi antarwilayah masih relevan untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan penetrasi internet yang diukur melalui persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir sebagai indikator perkembangan digital serta memasukkan tenaga kerja formal sebagai representasi kualitas kesempatan kerja dalam suatu wilayah. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang menggunakan Gini Ratio atau Indeks Theil, penelitian ini menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur disparitas ekonomi antarprovinsi karena dinilai lebih sesuai dalam menggambarkan kesenjangan pembangunan antarwilayah (Sjafrizal, 2018).

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada Teori Pertumbuhan Endogen yang dikemukakan oleh Paul Romer sebagaimana dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2020). Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh akumulasi modal dan faktor-faktor eksternal, tetapi juga oleh kemajuan teknologi, inovasi, pengetahuan, dan kualitas sumber daya manusia yang berkembang dari dalam perekonomian. Dalam konteks penelitian ini, penetrasi internet merepresentasikan perkembangan teknologi, sedangkan tenaga kerja formal merepresentasikan kualitas kesempatan kerja dan kapasitas produktif

tenaga kerja dalam suatu wilayah yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi daerah. Perbedaan tingkat perkembangan teknologi digital dan kesempatan kerja formal antarprovinsi diduga memengaruhi tingkat disparitas ekonomi di Pulau Jawa sehingga hubungan antarvariabel tersebut perlu dibuktikan secara empiris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Penetrasi Internet dan Tenaga Kerja Formal terhadap Disparitas Ekonomi Antarprovinsi di Pulau Jawa Tahun 2020–2024 (Pendekatan Data Panel).”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh penetrasi internet terhadap disparitas ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2020–2024?
2. Seberapa besar pengaruh tenaga kerja formal terhadap disparitas ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2020–2024?
3. Sejauh mana perkembangan penetrasi internet dan tenaga kerja formal secara simultan berpengaruh terhadap disparitas ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2020–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh penetrasi internet terhadap disparitas ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2020-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja formal terhadap disparitas ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2020-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh penetrasi internet dan tenaga kerja formal secara simultan terhadap disparitas ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang ekonomi pembangunan, ekonomi regional, dan ekonomi digital, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi disparitas ekonomi antarwilayah. Penelitian ini menyoroti peran penetrasi internet dan tenaga kerja formal dalam memengaruhi disparitas ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara perkembangan teknologi digital, kondisi ketenagakerjaan, dan disparitas ekonomi dalam perspektif Teori Pertumbuhan Endogen. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai pengaruh penetrasi internet dan tenaga kerja formal terhadap disparitas ekonomi antarwilayah di Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi akademik terkait pemanfaatan analisis data panel dalam mengkaji pengaruh perkembangan teknologi dan kondisi ketenagakerjaan terhadap disparitas ekonomi antarwilayah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata, khususnya melalui perluasan akses internet dan peningkatan kesempatan kerja formal sebagai upaya untuk mengurangi disparitas ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa.

- Bagi Lembaga Perencanaan Pembangunan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bukti empiris mengenai pengaruh penetrasi internet dan tenaga kerja formal terhadap disparitas ekonomi, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

- Bagi Masyarakat dan Pelaku Ekonomi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan internet dan peningkatan partisipasi dalam sektor kerja formal sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

- Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penetrasi internet, tenaga kerja formal, dan disparitas ekonomi antarwilayah di Indonesia. Selain itu, penggunaan Indeks Williamson dan analisis data panel dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian kuantitatif di bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tahun 2020-2024 yang melibatkan 6 Provinsi di Pulau Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian adalah Indeks Williason (Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur), penetrasi internet dan Tenaga Kerja Formal.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematikan penulisan yang ditetapkan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup enam sub bab yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membantu penulis penelitian ini, bab ini mencatumkan penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian, serta teori-teori yang relevan dan mendukung yang digunakan dalam penelitian ini untuk

mencapai hasil ilmiah. Selain itu, bab ini juga membahas kerangka kerja konseptual dan mengemukakan hipotesis penelitian secara rinci.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan uraian mengenai proses penelitian yang akan dilaksanakan, mencakup penjelasan tentang jenis dan sumber data, definisi operasional variabel yang digunakan, serta metode analisis dan estimasi data panel yang dipilih. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan setiap langkah dilakukan secara sistematis dan mendukung keakuratan hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mempresentasikan hasil analisis kuantitatif terkait pengaruh penetrasi internet dan tenaga kerja formal terhadap disparitas ekonomi, berdasarkan indeks williamson, serta interpretasi dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari temuan penelitian beserta rekomendasi yang dapat disampaikan, baik untuk studi lanjutan maupun bagi pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah.